

SKRIPSI

MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARDI SAPUTRA

NIM. 2010211310094

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juni 2024

SKRIPSI

MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARDI SAPUTRA

NIM. 2010211310094

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

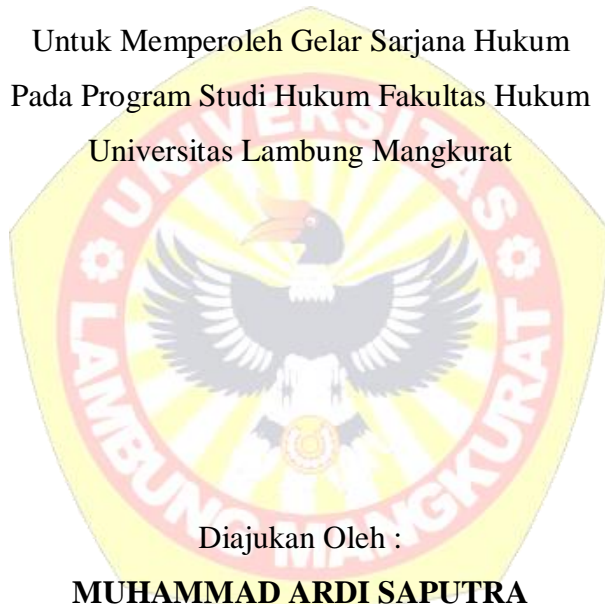
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juni 2024

MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARDI SAPUTRA

NIM. 2010211310094


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL

Diajukan oleh :
MUHAMMAD ARDI SAPUTRA
NIM. 2010211310094

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis
tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 27 Juni 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL

Diajukan oleh :
MUHAMMAD ARDI SAPUTRA
NIM. 2010211310094

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 367 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2024
Tanggal : 15 JUL 2024

Disahkan
Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 367/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 15 Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ardi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310094
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 19 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ardi Saputra
NIM. 2010211310094

MOTO

“Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.” (Napoleon Hill)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Ayah dan Ibu Tercinta

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah saya **Muhammad Ahyar, ST** dan Ibu saya **Indrijati S.Sos.**, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

Kakak Tersayang

Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak saya tercinta **dr. Hadi Prasetyo** yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.

Dosen Pembimbing

Terima kasih untuk Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RINGKASAN

Muhammad Ardi Saputra. 18 Juni 2024. **MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial dan mengamankan pengembangan sistem jaminan sosial. Pemerintah harus mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama melalui bantuan sosial (bansos) yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan menekan pengeluaran keluarga miskin. Namun, tantangan dalam distribusi bansos mencakup ketidaktepatan sasaran dan maladministrasi, termasuk pemotongan dana oleh oknum aparat. Penyelesaian pengaduan terkait bansos menggunakan mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak, mencegah penundaan, dan mengatasi masalah administrasi lainnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis mekanisme penyaluran bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan; 2) Menganalisis bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan untuk menganalisis keaburan hukum adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yakni sebagai berikut : Mekanisme penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui program-program yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mencakup asuransi kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima, dengan proses registrasi, edukasi, penyaluran, dan penggunaan dana tanpa biaya bagi penerima. Namun, terdapat beberapa celah yang berpotensi menyebabkan

maladministrasi, seperti ketidakakuratan data penerima, sosialisasi yang kurang efektif, kemungkinan kolusi antara petugas bank dan pemberi bantuan, serta kurangnya pengawasan terhadap bank penyalur. Celah-celah ini dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial, dan; 2) Maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial sering terjadi dalam beberapa bentuk, diantaranya penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, dan tindakan sewenang-wenang. Lembaga seperti Ombudsman RI berperan penting dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus ini. Selama pandemi Covid-19, berbagai bentuk maladministrasi, seperti politisasi bantuan sosial untuk kepentingan pemilihan umum, semakin menonjol. Contoh lainnya adalah penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk mendukung kandidat politik tertentu selama masa pra-pemilu 2024. Situasi darurat dan ketidakpastian, seperti pada masa pandemi dan menjelang pemilu, sering dimanfaatkan oleh pejabat untuk menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi atau politik.

Saran yang diberikan penulis untuk mencegah maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial, perlu diterapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta lembaga independen seperti Ombudsman RI. Penggunaan teknologi digital untuk verifikasi data penerima dan pelacakan penyaluran dana dapat membantu meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Muhammad Ardi Saputra. 18 Juni 2024. **MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial dan mengamankan pengembangan sistem jaminan sosial. Pemerintah harus mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama melalui bantuan sosial (bansos) yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tantangan dalam distribusi bansos mencakup ketidaktepatan sasaran dan maladministrasi, termasuk pemotongan dana oleh oknum aparat. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis mekanisme penyaluran bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan; 2) Menganalisis bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan untuk menganalisis keaburan hukum adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yakni sebagai berikut : 1) Mekanisme penyaluran bantuan sosial melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mencakup asuransi kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima, dengan proses registrasi, edukasi, penyaluran, dan penggunaan dana tanpa biaya bagi penerima. Terdapat beberapa celah yang berpotensi menyebabkan maladministrasi, seperti ketidakakuratan data penerima, sosialisasi yang kurang efektif, kemungkinan kolusi antara petugas bank dan pemberi bantuan, serta kurangnya pengawasan terhadap bank penyalur, dan; 2) Maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial sering terjadi dalam beberapa bentuk, diantaranya penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, dan tindakan sewenang-wenang. Selama pandemi Covid-19, berbagai bentuk maladministrasi, seperti politisasi bantuan sosial untuk kepentingan pemilihan umum, semakin menonjol. Contoh lainnya adalah penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk mendukung kandidat politik tertentu selama masa pra-pemilu 2024. Situasi darurat dan ketidakpastian, seperti pada masa pandemi dan menjelang pemilu, sering dimanfaatkan oleh pejabat untuk menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi atau politik.

Kata kunci : Kesejahteraan masyarakat, Bantuan sosial (bansos), Maladministrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

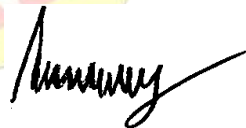
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **MALADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Allah SWT**, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, Ayah saya **Muhammad Ahyar, ST** dan Ibu saya **Indrijati S.Sos.**, yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral dan spiritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Kakak tercinta **dr. Hadi Prasetyo**, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impian.
4. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
9. Keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih banyak kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya pada Program Khekususan Hukum Tata Negara.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 18 Juni 2024
Penulis,



Muhammad Ardi Saputra
NIM. 2010211310094

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Maladministrasi.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Bantuan Sosial.....	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	22
B. Bentuk Maladministrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial.....	26
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA	44
RIWAYAT HIDUP	46

